



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERRY NUGRAHA**
2. Jabatan : **EXECUTIVE VICE PRESIDENT MANAJEMEN ASET, ENJINIRING DAN SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI**
3. NHK : **215670**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 7.367.400.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 249 m2/125 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN Rp. 1.700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
3. Tanah Seluas 735 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 262.500.000
4. Tanah Seluas 735 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 204.900.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 876.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, NISSAN SERENA 2.0 (4X2) A/T Tahun 2015, LAINNYA Rp. 110.000.000
3. MOTOR, YAMAHA B04/MT 250 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
4. MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
5. MOBIL, HONDA NEW ACCORD Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 144.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 637.592.192 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 9.024.992.192 |
| III. HUTANG | Rp. | 110.820.765 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 8.914.171.427 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.